

**DAMPAK KEBIJAKAN NAWACITA JOKOWI TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

ST.NURAI SYAH M.

E 131 14 008

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK KEBIJAKAN NAWACITA JOKOWI TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA

NAMA : ST. NURAI SYAH M.

NIM : E13114008

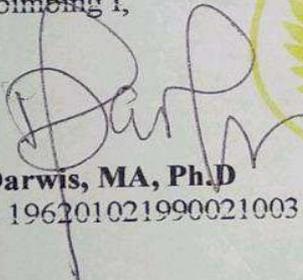
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

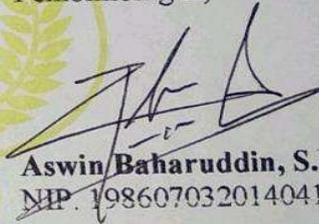
Makassar, 17 Mei 2019

Mengetahui :

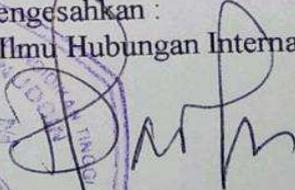
Pembimbing I,


H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA, Ph.D ,
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK KEBIJAKAN NAWACITA JOKOWI TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA

N A M A : ST. NURAI SYAH M.

N I M : E13114008

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 13 Mei 2019.

TIM EVALUASI

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Aswin Baharuddin, S.IP, MA

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanarrahim,

Segala puji kita panjatkan atas segala rahmat, nikmat, karunia serta kemudahan dan berkah yang selalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Dampak Kebijakan Nawacita Jokowi Tentang Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia”**. Tak lupa, salawat seiring salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam sebagai contoh sempurna akhlak manusia. Alhamdulillah, dalam proses penyelesaian skripsi yang panjang ini penulis dapat melewatinya berkat bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan semua pihak yang mampu membuka jalan bagu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana Ilmu Hubungan Internasional. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muslimin dan Ibunda Nurbaya,S.Pd. Yang telah mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup sangatlah keras dibutuhkan kesabaran, tawakkal, dan perjuangan yang amat besar. Terutama untuk ibunda tercinta, yang penuh kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis yang terkadang keras kepala dan tidak mau mengalah dengan adik-adik. Terima kasih atas doa dan dukungan dari kedua orang tua penulis yang tiada henti-hentinya, kasih sayang kalian yang sungguh besar tidak akan pernah bisa penulis membalasnya.
2. Adik-adikku, St.Khadijah dan Muh.Alif Al-Amin. Terima kasih telah memberikan semangat buat penulis dalam menyusun skripsi ini. Buat Ijha, yang kadang bagi penulis lebih seperti “kakak” sekaligus teman jalan, teman makan, dan teman masak. Terima kasih karena sering mengalah demi penulis, semoga selanjutnya kita lebih banyak waktu bertiga dengan ibu untuk *woman time* hehe. Salam hangat buat adik-adikku from your only sweet sister.

apak H.Darwis, MA.Ph.D, selaku pembimbing I. Terima kasih untuk semua bimbingan, saran-saran, dan kadang *jokes* beliau ketika sedang



bimbingan. Serta kepada Bapak Aswin Baharuddin,S.IP,MA, selaku pembimbing II. Terima kasih pak untuk semua bimbingan, saran-saran yang begitu detail sehingga banyak hal yang penulis dapatkan. Semoga bapak sehat selalu. Tak lupa pula seluruh staf pengajar dan administrasi pada jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

4. Mahasiswa HI Fisip Unhas baik senior maupun junior yang membantu penulis dalam masa maba hingga mahasiswa tua di kampus. Juga teman seangkatan, AGRESI. Terima kasih atas segala kebersamaannya selama ini. Banyak cerita yang telah kita lewati bersama selama 4 tahun ini, semoga kita dapat bertemu kembali dengan *full member* nanti dengan membawa cerita baru.
5. Sahabat Syurga insyaa Allah, Tholabul Ilmi. Anita, *leader* yang sok tua tapi memang dia yang paling tua. Tina, wajah dan tingkahnya yang seperti anak kecil walaupun umurnya kedua tertua. Hadija, orang yang paling pertama saya kenal diantara anak TI yang lain dan si logat Bone yang paling kental. Nisa, kata-katanya kadang kasar membuat kita yang mendengar kadang tertawa. Marwah, si cantik dari lorong-lorong Makassar. Husnul, yang kadang lebih dewasa dari kami semua. Terima kasih atas segalanya. Banyak sekali yang penulis ingin curahkan pada kalian tetapi kertas ini mungkin tak akan cukup. *Uhibbukunna fillah, Ukhtifillah*. Salam dari orang ter-comel di Tholabul Ilmu, hehe. Tak lupa pula Isra yang punya nama panggilan yang sama dengan penulis, Asri teman cerita kpop dari maba. Terimakasih atas kebersamaannya. Semoga kita dapat dipertemukan kembali.
6. Teman se fakultas, seangkatan, tapi tak sejurusan. Eka, yang kamarnya selalu jadi tempat transit penulis. Terima kasih atas segalanya. Jika tak ada Eka penulis tak semangat menulis karena ia lah yang selalu menjadi tempat penulis meminta file kdrama atau kvariety yang penulis suka, hehehe. Serta Winda, Anggia, Hadry, Rahmi, Ayu terima kasih karena rut mewarnai kehidupan kampus penulis.

dik-adik dan kakak-kakak pengurus juga alumni pengurus UKM LDM nu Khaldun Fisip Unhas. Terima kasih telah mengajari penulis bagaiman



memenejemen waktu yang baik, belajar bersabar, dan kerja keras selama kepengurusan dan tetap semangat untuk pengurus dalam melanjutkan dakwah di bumi biru kuning.

8. MUMTAZ. Teman-teman masa SMPku. Terutama untuk met Nuhi dan sitt Nunu yang selalu sedia jika penulis meminta tolong. Terima kasih untuk segalanya.
9. Jumriani, Momo, dan Anggita. Empat sekawan yang saat sekolah selalu bareng. Terima kasih untuk segalanya, semoga kita bsa dipertemukan kembali.

Semoga kata pengantar ini tidak menjadi acuan satu-satunya besaran rasa syukur dan ucapan rasa terima kasih penulis kepada seluruh pihak. Penulis sangat bersyukur telah bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Akhir kata, penulis memohon maaf atas salah dan khilaf yang pernah dilakukan penulis dan mohon maaf apabila ada nama-nama yang belum tersebut diatas.

Makassar, 13 Mei 2019

St.Nuraisyah Muslimin



ABSTRAK

St.Nuraisyah M., E131 14 008. **“Dampak Kebijakan Nawacita Jokowi Tentang Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia”**, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Dosen Pembimbing I **H.Darwis,MA, Ph.D.** Pembimbing II **Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dampak kebijakan RI dalam kerjasama Sosek Malindo dan tantangan hubungan Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Dimana pada pemerintahan Presiden Jokowi ia menjadikan Nawa cita sebagai program prioritas pemerintahannya. Nawa cita sendiri adalah hasil rekonstruksi dari Trisakti Soekarno yang pemerintahannya sesuaikan dengan masa saat ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan Nawa cita Jokowi tentang pengembangan kawasan perbatasan terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, majalah, tabloid, surat kabar, dokumen, mapun dari media elektronik seperti internet. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program prioritas Jokowi atau yang disebut dengan Nawacita pada poin ketiga sudah terealisasi dengan baik di wilayah perbatasan, hal itu juga ditandai dengan bangkitnya kembali kerjasama antara Indonesia-Malaysia (Sosek Malindo). Walaupun masyarakat perbatasan belum merasakan perubahan yang sangat signifikan.

Kata Kunci: Nawacita, Pengembangan Kawasan Perbatasan, Sosek Malindo



ABSTRAC

St.Nuraisyah M., E131 14 008. **“Dampak Kebijakan Nawacita Jokowi Tentang Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia”**, department of International Relations, faculty of Sosial Science and Political Science, Hasanuddin University. Lecturer I **H.Darwis,MA, Ph.D.** Lecturer II **Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**

This research aims to describe how the impact of policy in Indonesia and challenges in Indonesia-Malaysia relations in the management of border areas. Where in the government of President Jokowi, Nawacita as a program of government priorities. Nawacita is the result of the reconstruction of Trisakti Soekarno, whose government has adjusted to the present.

The research method used in the preparation of this research is qualitative descriptive method aimed at describing the impact of Jokowi's Nawacita policy on the development of the border area towards the relations between Indonesia and Malaysia, technique of the data collection used is library research from various literature such as book, journal, newspaper, tabloid, magazine, and from electronic media as the internet. In this research, author also uses qualitative data analysis.

The results of this research indicate that Jokowi's priority program which is called Nawacita in third point it was well realized in the border region was also marked by revival of cooperation between Indonesia-Malaysia. Although, community in the border still has not felt a significant change.

Keywords: Nawacita, Border development, Sosek Malindo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN TIM PENERIMAAN EVALUASI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRAC.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Kebijakan Luar Negeri	17
B. Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan (Border Development) ...	26



BAB III DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA –	
MALAYSIA	31
A. Dinamika Hubungan Indonesia – Malaysia	31
B. Permasalahan Perbatasan Indonesia – Malaysia	39
C. Kebijakan Jokowi pada Pengelolaan Perbatasan.....	45
BAB IV KEBIJAKAN PERBATASAN RI PRESIDEN JOKOWI DAN	
DAMPAKNYA TERHADAP PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA	58
A. Dampak Perubahan Kebijakan RI Dalam Kerjasama Sosek Malindo Pada Era Jokowi Terhadap Perbatasan Indonesia – Malaysia	58
B. Tantangan hubungan Indonesia – Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta perbatasan Kalimantan dan Malaysia.....	41
Gambar 2. Tujuh PLBN Yang Masuk Dalam Program Prioritas Jokowi.....	52
Gambar 3. Pembangunan Jalan di Perbatasan.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel.1.Dinamika Kerjasama Sosek Malindo.....	35
Tabel 2. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten Sambas 2013-2017	43
Tabel 3. Trisakti dan Nawacita	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negeri hidup berdampingan antara penduduk dengan pemerintahannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di 3 (tiga) pulau, 4 (empat) provinsi dan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda (Saru Arifin, 2014, hal. 4). Salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia baik di darat maupun laut ialah Malaysia.

Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang bertetangga bahkan sering disebut negara serumpun, pada suatu periode tertentu hubungan kedua negara ini terlihat sangat bersahabat, kooperatif dan saling mendukung. Namun, pada periode lainnya hubungan tersebut berubah menjadi penuh ketegangan, saling curiga dan kurang bersahabat. Tidak jarang karakter hubungan kedua negara ini berubah sangat cepat dan dalam interval waktu yang sangat pendek. Hubungan diplomatik antara Indonesia – Malaysia telah terjalin lama. Pasca kemerdekaan

pada tahun 1957, Malaysia secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia (Setiawan A. , 2013, hal. 694). Walaupun demikian, hubungan



antar masyarakat sudah terjalin lama jauh sebelum lahirnya negara Malaysia dan Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.43 Pasal 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan hukum Internasional. Undang-Undang No.43 Pasal 1 Tahun 2008 juga menjelaskan, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Indonesia memiliki 187 kecamatan pada 41 kabupaten di 13 Propinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Diantaranya 68 kecamatan untuk perbatasan darat dan 119 kecamatan perbatasan laut (Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, 2018, hal. 1).

Pengelolaan batas wilayah negara Indonesia terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek pengelolaan batas negara wilayah darat, aspek pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, aspek penegelolaan lintas batas negara, dan aspek pengamanan perbatasan negara. Indonesia memiliki 66 Pos Lintas Batas (PLB) di seluruh Indonesia yakni, 39 PLB darat dan 27 PLB laut. PLB antara Indonesia-Malaysia sendiri terdapat 20 PLB yakni, 13 PLB di wilayah Kalimantan Barat dan 7 PLB di wilayah Kalimantan Utara (Ditjen Imigrasi, kemenkumham, 2018, hal. 7).

Daerah perbatasan Indonesia – Malaysia dapat dikatakan sebagai salah satu daerah yang cukup dinamis dengan berbagai kegiatan. Namun demikian

persoalan juga muncul dengan adanya peraturan yang berbeda, dimana berada di bawah kontrol pemerintah Indonesia sedangkan sisi yang lain



berada di bawah kontrol pemerintah Malaysia. Daerah ini juga diikuti oleh berbagai persoalan, persoalan di daerah perbatasan selalu muncul karena biasanya daerah perbatasan menjadi daerah yang kurang perhatian dari pihak penguasa. Sehingga menjadi tempat yang relatif aman untuk berkembangnya berbagai kegiatan ilegal seperti penyelundupan.

Terkait dengan kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia, Indonesia telah mendirikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (yang selanjutnya disebut BNPP) sesuai dengan amanat kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 yang diharapkan dapat menjadi payung hukum pemerintah pusat dan daerah untuk mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Ada tiga pendekatan yang digunakan BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan, yaitu pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. (Raharjo, 2012)

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam masa pemerintahannya dikena sebagai sosok politik yang *high profile*, sedangkan Jokowi menampilkan sosok *Low Profile* atau setidaknya mengurangi “terlalu banyak tampil di luar negeri” dan akan lebih fokus pada urusan dalam negeri atau ditujukan semata-mata untuk membenahi dan memperkuat “di dalam”. Ini kita lihat bagaimana agenda prioritas Joko – JK yang salah satunya adalah membangun perbatasan. Membangun perbatasan merupakan salah satu program prioritas



Jokowi yang tercantum dalam poin ke-3 Nawacita¹. Yang berbunyi, “*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan...*” (KPU, 2014, hal. 8) Artinya akan ada penguatan pada desentralisasi asimetris demi melindungi kepentingan nasional hingga ke wilayah perbatasan. Cita ketiga ini juga menyebutkan upaya untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global yang seharusnya dimulai dengan memperkuat daerah-daerah dalam paradigma ekonomi yang inklusif. Membangun hubungan konektivitas ekonomi antara Barat dan Timur Indonesia, antara pesisir hingga ke pelosok, antara kawasan landai hingga ke pegunungan, antara kawasan kota hingga pedesaan hingga otonomi di Indonesia tidak lagi menjadi macan kertas yang hanya berbunyi ditingkat peraturan, tapi tidak terimplementasi melalui pelayanan publik yang dapat dirasakan rakyat hingga ke pelosok (Kumolo, 2017, hal. 46).

Nawacita pada poin 3 menjelaskan bahwa dalam membangun Indonesia dari pinggiran, Ada 4 program yang dicanangkan oleh Jokowi yakni, desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan, penataan daerah otonomi baru untuk kesejahteraan rakyat, dan implementasi Undang-Undang Desa. Jokowi menjadikan PLBN sebagai pintu gerbang negara yang aman, nyaman, dan ramah investasi. Sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia terdapat 3 PLBN



cita-cita. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk n semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, ulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

yang masuk dalam agenda prioritas Jokowi yakni PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.

Jokowi dalam peresmian PLBN Entikong di Kalimantan Barat mengatakan bahwa pos perbatasan menyangkut masalah harga diri, kebanggaan, nasionalisme, dan martabat yang akan terus dikerjakan oleh pemerintahannya (Humas Sekretariat Kabinet RI, 2016). Membenahi perbatasan pasti juga mengerek hal lain misalnya infrastruktur. Dengan infrastruktur itu juga, sisi sosial dan ekonomi masyarakat meningkat. Kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi bahkan menjadi pusat pertumbuhan baru. PLBN sendiri selain berfungsi sebagai etalase negara juga berfungsi sebagai pasar modern, pusat perdagangan yang besar, dan dapat mengendalikan penyelundupan.

Pemerintah Indonesia telah lama mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor dan impor. Selain itu, pemerintah juga melakukan kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia – Indonesia (Sosek Malindo).

Untuk mengatur lalu-lintas barang (perdagangan tradisional) antar masyarakat perbatasan, maka kedua pemerintahan baik Republik Indonesia dan

Malaysia pun membuat sebuah kesepakatan berupa *Border Trade Agreement* (BTA) atau “Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara



Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia.” Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta. Salah satu isi kesepakatannya berupa Sosek Malindo guna “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek Malindo menuju 2020.” Agar visi kerjasama ini dapat direalisasikan, maka misi yang dilaksanakan adalah: pertama adalah dengan tujuan menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah. Kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan serta berorientasi kelestarian lingkungan. Ketiga, meningkatkan kerjasama sosial budaya lewat peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM di kedua daerah perbatasan. Kerjasama perbatasan antara dua negara Republik Indonesia-Malaysia pada awalnya dimulai dengan bidang keamanan pada sejak tahun 1967 (Sudiar, 2014, hal. 37).

Sosek Malindo dibentuk untuk menyelesaikan isu-isu sosial ekonomi di perbatasan salah satunya adalah penyelundupan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam terbentuknya mekanisme kerjasama Sosek Malindo ini adalah:

- a. Menentukan infrastruktur pembangunan, sosial budaya, administrasi, dan kegiatan-kegiatan sosialekonomi yang ada.
- b. Menentukan wilayah yang perlu mendapat perhatian dari segi keamanan untuk pembangunan selanjutnya sesuai prioritas.
- c. Meningkatkan pembangunan yang ada ke taraf yang akan memberi manfaat kepada rakyat, seimbang dengan keperluan keamanan.



- d. Mempelajari keperluan untuk pembangunan proyek-proyek baru di bidang sosial ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan keamanan dan kesejahteraan untuk jangka pendek dan panjang.
- e. Memastikan keperluan fasilitas atau kemudahan yang dapat digunakan bersama.
- f. Mengkoordinasi pembangunan kedua pihak sejalan dengan rancangan yang telah disetujui.
- g. Mewujudkan satu cara dimana implikasi pendanaan untuk pembangunan di wilayah perbatasan memungkinkan untuk dibiayai oleh kedua pihak.

Dalam strukturnya, Sosek Malindo diketuai oleh *General Border Committee* (GBC) di masing-masing negara dan untuk Indonesia Ketua GBC dipimpin oleh Panglima TNI. Dengan adanya kerjasama Sosek Malindo ini, maka diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan di Kalimantan.

Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara merupakan simbol kedaulatan sebuah negara, kebanggaan dan representasi sebuah bangsa. Kepala negara akan menentukan kebijakan negaranya baik untuk aspek internasional maupun domestik. Kepala negara akan menentukan seperti apakah kebijakan yang akan ia ambil sebagai sebuah hal pemikiran dan kepribadian kepala negara.

Sosek Malindo di bawah Nawacita yang merupakan rujukan kerja 4 tahun

menunjukkan perubahan yang membuat peneliti tertarik untuknya. Pada Tahun ini kerjasama Sosek Malindo telah memasuki 20 tahun



dan hubungan Indonesia – Malaysia mengalami pasang surut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba mengkaji serta menganalisa “**Kebijakan Nawacita Jokowi Tentang Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia**”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kebijakan Nawacita Jokowi tentang pengembangan kawasan perbatasan. Dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang, penulis juga berfokus terhadap dampak kebijakan Nawacita Jokowi tentang pengembangan kawasan perbatasan terhadap hubungan Indonesia-Malaysia.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kebijakan RI dalam kerjasama Sosek Malindo pada Era Jokowi terhadap hubungan Indonesia – Malaysia?
2. Bagaimana tantangan hubungan Indonesia – Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentang dampak kebijakan Nawacita Jokowi tentang pengembangan kawasan perbatasan terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak kebijakan RI dalam kerjasama Sosek Malindo pada Era Jokowi terhadap hubungan Indonesia – Malaysia.



2. Untuk mengetahui tantangan hubungan Indonesia – Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi acuan pengetahuan terkait kebijakan RI dalam kerjasama Sosek Malindo dan dampaknya terhadap hubungan Indonesia-Malaysia.
2. Secara akademis, dapat dijadikan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dalam studi Ilmu Hubungan Internasional bagi peneliti yang memiliki kajian lebih lanjut mengenai kebijakan Nawacita Jokowi di kawasan pengembangan perbatasan dan dampaknya terhadap hubungan Indonesia-Malaysia.

D. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri biasa dipahami sebagai perpaduan dan refleksi dari kebijakan dan prioritas dalam negeri (Wuryandari, Politik Luar Negeri Indonesia, 2011, hal. 111). Menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*. Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian

ntingan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, tindakan, metode panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan



sebagainya yang dengannya pemerintah saling menjalankan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta para aktor non-pemerintah. (Robert Jackson, 2014, hal. 439)

Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal (Walter Carlsness, 2013, hal. 707). Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.

Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu negara yang sadara memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung untuk memperhatikan keseimbangannya dan melanjutkan usaha ke arah tujuannya dari pada mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru. pembentukan kepentingan nasional adalah langkah pertama, meskipun masih abstrak sifat konsepnya dalam merumuskan politik luar negeri.

Suatu negara lazimnya berusaha mewujudkan tujuan nasionalnya melalui formulasi kebijaksanaan politik luar negeri. Dalam hal ini Holsti berpendapat bahwa: Kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk (1) menanggulangi permasalahan, (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional (Holsti, 2008, hal. 131).

Tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. tersebut memuat gambaran atau keadaan negara di masa mendatang dan



kondisi masa depan yang diinginkan. Pemerintah negara menetapkan berbagai sarana yang diusahakan untuk dicapai dengan melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan dan tujuan.

Perumusan serta pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara secara jelas harus dapat mewakili aspek-aspek dasar yang diinginkan suatu negara tersebut. Aspek-aspek yang mendasari pengambilan kebijakan luar negeri tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek yang ada didalam negeri. Keadaan dalam negeri suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan suatu kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

Berbicara terkait kebijakan, Presiden sebagai Kepala Negara dalam membuat kebijakan harus mampu mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti keadaan dalam masyarakatnya. Secara demikian, dengan mengacu pada konsep tentang kebijakan ini, maka kebijakan *nawacita* di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo, harus mampu menjadi langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.

2. Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan (Border Development)

Border Development atau pengembangan perbatasan adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah di dua

yang berbeda otoritas. Menurut terminologi Ratti (1993), pengembangan perbatasan merupakan sebuah rangkaian proses pergerakan yang semula



dari daerah perbatasan (*frontier*) sebagai sebuah *barrier* (rintangan), menjadi suatu kawasan perbatasan sebagai *filter*, kemudian membentuk kawasan perbatasan sebagai sebuah zona kontak. Menurut Wu (Wu, 2001), terdapat banyak pendekatan dalam pengembangan wilayah perbatasan, namun terdapat tiga faktor penting dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan lebih lanjut, yaitu: pengembangan yang didahului oleh perencanaan dan pengembangan infrastruktur(sebelum kegiatan pengembangan ekonomi), pengembangan investasidi sektor swasta, dan pengembangan programkebijakan.

Atas dasar itu, mengembangkan wilayah perbatasan dilakukan berdasarkan karakteristik dominan yang ada pada wilayah perbatasan karena terdapat perbedaan-perbedaan signifikan dalam kategori ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan program-program dan kebijakan (policy) yang bertujuan memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk bahan pertimbangan dan pembeda dalam melanjutkan penelitian.Penelitian tentang daerah perbatasan dan kerjasama antar kedua negara sudah banyak dilakukan oleh para akademisi, tetapi masih kurang penelitian yang memfokuskan penelitiannya di era Presiden Jokowi.Penelitian pertama berjudul” Dampak Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia Sosek Malindo Terhadap Masyarakat Perbatasan Sebatik Kalimantan Timur” (Setiawan M. A., 2014) oleh Muhammad Andre Setiawan.Skripsi ini menjelaskan dampak kerjasama Indonesia – Malaysia dalam bidang sosial – yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia masyarakat Sebatik.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif



dimana subyek penelitiannya adalah masyarakat Sebatik 5 orang (seluruh lapisan masyarakat) dan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan.

Penelitian kedua adalah karya Nurfitri Nugrahaningsih yang berjudul “Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia : Studi Tentang Sosek Malindo Dalam Pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Di Jagoi Babang” (Nugrahaningsih, 2015, hal. 149). Kesimpulan jurnal ini adalah pertama, keberadaan PPLB di Jagoi Baban belum merupakan *mutual priority* antar pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kedua, kelemahan diplomasi karena aktor pelaksana diplomasi dalam kerjasama Sosek Malindo adalah birokrat yang posisinya sering berganti. Ketiga, kurangnya komitmen pemerintah. Keempat, *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di Jagoi Babang (Nugrahaningsih, 2015, hal. 153 - 154).

Penelitian ketiga adalah Tesis karya Fahrizal Siregar, S.H. yang berjudul “Implikasi Hukum Kesepakatan Kerjasama Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (SOSEK MALINDO) Terhadap Upaya Pecegahan Masuknya Barang Ilegal Melalui Jalur Perbatasan Entikong” (Fahrizal Siregar, 2017). Kesimpulan dalam tesis ini adalah bahwa kesepakatan kerjasama ini menimbulkan implikasi hukum yaitu adanya kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama Sosek Malindo, dimana dalam kesepakatan kerjasama ini membahas masalah penanganan terhadap lalu lintas perdangan lintas batas dan penceahan terhadap perdangan barang-barang illegal melalui perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak. Adapun upaya-upaya yang

untuk mencegah masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong melalui kesepakatan kerjasama Sosek Malindo antara lain: penanganan dan penjagaan jalur-jalur masuknya barang-barang illegal yang biasa



digunakan oleh pelaku usaha, termasuk jalur-jalur tikus, melakukan koordinasi dengan pihak bea cukai Malaysia apabila terdapat angkutan yang membawa barang dari Malaysia dalam jumlah besar yang akan melewati pintu batas Entikong, dan membuat pos-pos pemeriksaan di titik-titik yang dianggap rawan masuknya barang-barang ilegal melalui perbatasan kedua negara (Fahrizal Siregar, 2017, hal. 83 - 84)

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Penulis memilih metode penelitian ini, karena penulis ingin, menggambarkan atau mendeskripsikan tentang dampak kebijakan Nawacita Jokowi tentang pengembangan kawasan perbatasan terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia. Metode ini digunakan karena sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Selain itu, dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif lebih menekankan pada pengumpulan fakta, pemilahan fakta, generalisasi fakta, dan analisis teks tertulis. Sehingga dalam metode ini mengharuskan mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber yang ada.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui metode Telaah Pustaka (*Library Research*) dan melihat perkembangan aktivitas yang sehubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis. Dimana data terkumpul diperoleh dari berbagai sumber seperti pada buku, jurnal, surat kabar, dokumen, maupun dari media elektronik seperti internet



yang dikumpulkan dengan cara mengelola data tersebut sehingga menjadi data yang siap digunakan dalam penelitian ini.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung. Sumber data sekunder berupa sumber dari buku, majalah ilmiah, maupun dokumen-dokumen terkait. Data sekunder ini juga dibutuhkan penulis untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Adapun data yang dibutuhkan yaitu, data yang berkaitan dengan kebijakan Nawacita Jokowi di perbatasan dan dampaknya terhadap hubungan Indonesia – Malaysia.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang akan digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan untuk data kuantitatif yang merupakan data yang berupa angka-angka statistic yang dapat menguatkan analisis kualitatif.



5. Metode penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum kemudian diikuti dengan penjelasan secara khusus untuk ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan dengan menggunakan fakta-fakta yang memanfaatkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan luar negeri, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri. Definisi yang diberikan Kegley dan Wittkopf menekankan kebijakan luar negeri sebagai *decisions governing authorities make to realize international goals*. Dalam hal ini kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*. Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara.

Demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari



kepentingan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, strategi, tindakan, metode panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya yang dengannya pemerintah saling menjalankan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta para aktor non-pemerintah. (Robert Jackson, 2014, hal. 439)

a. Fungsi Umum Kebijakan Luar Negeri

Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah:

1. Melindungi keamanan nasional, misalnya, dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain;
2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya, dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing;
3. Membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral, dan
4. Mendukung martabat manusia melalui, misalnya, bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi. (Syarief, 2014)

Mengidentifikasi fungsi-fungsi politik luar negeri tidak berarti bahwa negara gagal untuk mencapai tujuan lain (misalnya, menyebarkan ideologi politik atau agama), atau bahwa setiap negara bergerak di bidang kebijakan luar negeri di bawah setiap fungsi, atau bahwa setiap negara diberikan mengejar fungsi-fungsi ini koheren atau efektif. Menggambarkan fungsi dasar membantu, namun,

analisis pusat pada apa negara berusaha untuk mencapai melalui kebijakan luar negeri mereka. Umumnya, negara apa yang di slot kebijakan luar negeri



mereka ke dalam salah satu fungsi tersebut. Secara tradisional, fungsi-fungsi kebijakan luar negeri telah ada dalam hirarki, dengan keamanan nasional dan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan menerima bagian terbesar dari perhatian. Selama Perang Dingin, keamanan nasional dan kekuatan ekonomi yang erat terhubung, terutama untuk kekuatan besar, yang menerangi mengapa para pembuat kebijakan luar negeri dilihat hampir segala sesuatu melalui lensa keamanan dan kekuasaan materi. Oleh karena itu, penyediaan bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk hak asasi manusia sebagian besar terperangkap dalam persaingan geopolitik untuk keamanan dan kekuasaan dipupuk oleh sistem internasional bipolar. Dalam lingkungan ini, masalah kesehatan pada dasarnya tidak berpengaruh independen pada pembuatan kebijakan luar negeri.

b. Tujuan Kebijakan Luar Negeri

Istilah kepentingan nasional kadang-kadang disalahgunakan sebagai alat untuk menganalisis tujuan bangsa. Kenyataannya terjadi perebatan ilmiah yang berkepanjangan mengenai arti konsep ini, namun hanya sedikit kesepakatan yang dicapai. Kelemahan utamanya adalah kekaburan konsep tersebut. Seperti yang dituliskan oleh Paul Seabury: Ide kepentingan nasional mungkin mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan dalam tindak hubungan luar negerinya. Dengan istilah yang lebih baik, kita mungkin dapat menyebutkannya konsep kepentingan nasional yang bersifat normatif dan kewarganegaraan. Arti kedua yang sama pentingnya mungkin dapat disebut

gan yang bersifat deskriptif. Dalam arti kepentingan nasional mungkin dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinannya



dengan perjuangan yang gigih. Bila kita bicara tentang kepentingan nasional dalam arti deskriptif ini, kita keluar dari bidang metafisika ke alam kenyataan. Dapat juga dikatakan bahwa kepentingan nasional adalah apa yang dikatakan pembuat kebijakan luar negeri sebagai kepentingan nasional. Definisi ketiga dapat membuat arti kepentingan nasional agak lebih jelas. Kepentingan nasional Amerika sering menjadi arena konflik antarindividu dan kelompok masing-masing yang mempunyai konsepsi yang sangat berbeda. Ketidaksepakatan mengenai kebijakan dan tindakan mungkin timbul diantara mereka yang pada dasarnya setuju akan tujuan umum negara mereka di dunia. Namun ketidaksepakatan kebijakan biasanya disebabkan perbedaan pendapat diantara pembuat kebijakan mengenai konsepsi tentang apakah Amerika Serikat dan apa peranannya dalam politik dunia, bahkan bagaimana seharusnya misi yang diembannya. Walaupun mungkin terdapat kepentingan nasional yang bersifat tetap seperti pemeliharaan diri yang disepakati setiap orang namun tidak seorangpun dapat mengkalim dengan pasti bahwa setiap tujuan khusus dan tujuan lainnya merupakan serangkaian kepentingan nasional. Dalam hal ini untuk menghindari istilah tersebut maka digunakan konsep tujuan yang sebenarnya adalah gambaran atau keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi yang dikemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain. Ada 3 tujuan dalam kebijakan luar negeri yaitu:



Tujuan kepentingan dan nilai inti

Kepentingan dan nilai inti dapat digambarkan sebagai sejenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis. Kepentingan dan nilai inti seringkali dihubungkan dengan pemeliharaan diri suatu unit politik. Kepentingan dan nilai inti merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain jelas tidak dapat dicapai apabila unit politik yang menegukannya tidak mempertahankan eksistensinya sendiri. Definisi yang tepat dari nilai atau kepentingan inti di negara tertentu tergantung pada sikap mereka yang membuat kebijakan.

2. Tujuan Jangka Menengah

Terdapat beberapa tujuan jangka menengah yaitu: Mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi adalah tujuan utama semua pemerintah pada zaman ini tidak dapat dicapai dengan kekuatan sendiri. Karena terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh satu negara misalnya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi maka perlu adanya interaksi dengan negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui perdagangan, bantuan luar negeri, akses informasi yang dapat juga meningkatkan kesejahteraan. Jenis yang kedua dari tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu. Pada saat ini, prestise dapat diukur melalui tingkat perkembangan industri dan keterampilan ilmiah serta

.Tujuan jangka menengah ini tidak mempunyai unsure waktu khusus, bagian pemimpin masa kini dan negara berkembang berharap dapat mulai



mengejar negara-negara yang ekonominya lebih maju. Negara industri dan negara maju dapat meningkatkan gengsi internasionalnya melalui sejumlah kebijakan dan tindakan, termasuk ekspansi kemampuan militer, pembagian bantuan luar negeri, jalur diplomatik serta kunjungan balasan oleh kepala negara serta pameran industri. Tujuan jangka menengah yang ketiga mencakup banyak bentuk perluasan diri atau imperialisme. Beberapa negara mengklaim wilayah tatangga sekalipun wilayah itu tidak memenuhi persyaratan militer atau kesatuan etnis yang penting. Perluasan wilayah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri terlepas apakah ia memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan strategis, ekonomis atau sosial

3. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, pandangan, mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya. Perbedaan antara tujuan jangka menengah dan jangka panjang tidak hanya berhubungan dengan unsur waktu yang berlainan yang inheren di dalamnya., juga terdapat perbedaan penting dalam lingkup. Dalam rangka mengejar tujuan jangka menengah, negara melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu untuk mengejar tujuan jangka panjang, negara biasanya melancarkan tuntutan universal karena tujuannya tidak kurang dari membangun kembali sistem internasional menyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan.

c. Tindakan Kebijakan Luar Negeri

kebijakan juga mengandung komponen tindakan, yakni hal yang pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi



peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan pada dasarnya merupakan satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah negara yang bersangkutan. Proses politik internasional dimulai bila negara katakanlah negara A berusaha melalui berbagai tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku. Misalnya, tindakan, citra dan kebijakan negara lain. Dengan demikian, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan umum suatu negara untuk mengendalikan perilaku negara lain. (Syarief, 2014, hal. 4)

d. Faktor Domestik dalam Model Kebijakan Luar Negeri

a) James N. Rosenau

Menurut James N. Rosenau yaitu. Pertama, societal sources (Economic Development, Cultural and History, Sosial structure, dan Moods of Opinion). Kedua, Governmental sources (Political accountability and governmental structure). (Syarief, 2014, hal. 14)

1. Societal Sources

a. Economy

Pemerintah mengedepankan kepentingan ekonomi dalam kebijakan luar negerinya, hal itu dipandang dari masyarakat industri memiliki kebutuhan yang berbeda dari masyarakat agrikutural, mereka perlu mengimpor berbagai jenis komoditas dan harus memiliki hubungan moneter dengan mitra dagang mereka di luar negeri, pengambil keputusan harus merumuskan kebijakan luar negeri untuk

keragaman kepentingan negaranya, yang akan menghasilkan
keputusan ekonomi.



b. Cultural and history

Pemerintah mengeluarkan kebijakannya berdasarkan norma dan tradisi mendasari hubungan antar anggota suatu masyarakat, memandang budaya dalam memberikan norma untuk menafsirkan dan menolak dalam kebijakan luar negerinya.

c. Social sctructure

Memandang seharusnya masyarakat mendapat pendidikan yang tidak terbatas karena ras, para pemimpin politik direkrut serta sumber daya manusia yang dikembangkan akan membentuk efektivitas tindakan negara.

d. Mood opinion

Melihat bahwa dalam sebuah negara otoriter , dengan presepsi negatif dari masyarakat tidak dapat mempengaruhi negara dalam kebijakan luar negeri, sebaliknya dalam negara demokrasi, presepsi masyarakat mempengaruhi kebijakan luar negeri sumber pemerintah.

2. Governmental sources

Menjelaskan bahwa pemerintah yang demokrasi kurang efisien dalam dana, namun fleksibel dalam kebijakan luar negeri sebab menerima saran dan kritik, sebaliknya pemerintah yang otoriter sangat efisien dan hanya memobiliasi massa sesuai kehendak pemerintah. Di samping itu, sistem dua partai pemerintah kemungkinan akan menghasilkan saran dan masukan kebijakan luar negeri yang

dengan multi partai.



b) Alex Mintz

Model selanjutnya dijelaskan oleh Alex Mintz¹⁹, untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara berdasarkan faktor domestiknya, yaitu: (Syarief, 2014, hal. 15)

1. *Diversionsary Tactics*, adalah kebijakan luar negeri yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam sebuah negara, dan untuk mempertahankan posisi pemimpin dalam negara, dengan mengalihkan isu tersebut terhadap isu yang muncul dari ancaman luar.
2. *Economic Interests and Foreign Policy Decision*, adalah kebijakan ekspansi sebuah negara yang sering dipandang untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka. Motivasi imperialistik menjadi faktor utama untuk kebijakan luar negerinya. Studi Kasus: Jepang melakukan politik dumping agar produk mereka diterima dan dibeli negara lain, demi menaikkan income negaranya dan mencari pangsa pasar perusahaannya, berupa elektronik, mobil, dan lainnya.
3. *The Role of Public Opinion*, adalah opini publik yang dapat menekan, memaksa, dan mempengaruhi pemimpin dalam negara demokrasi untuk menerapkan keinginannya dalam kebijakan luar negeri. Mereka juga dimungkinkan menjadi pengaruh utama dalam penggunaan dan penghentian kekuatan militer negara dalam krisis. Studi Kasus: Opini

publik masyarakat Perancis terhadap perang Vietnam pada 1950, bahwa publik menyukai untuk mengakhiri perang, mereka menganggap perang



adalah tindakan tidak bermoral dan ilegal, sehingga terjadi pergeseran opini untuk memilih jalan kooperasi.

4. *Electoral Cycles*, banyak bukti menggambarkan pemilu berperan penting dalam menganalisa pembuatan kebijakan oleh pemimpin. Jangka waktu dalam pemilu digunakan untuk mempertahankan politik dan melawan rivalnya. Pemimpin yang ingin bertahan dalam politik tergantung pada konstituennya untuk menyetujui kebijakan yang mereka inginkan agar mereka senang. Sehingga, dapat dimungkinkan kesempatan terpilih kembali pemimpin tersebut—jika baru satu periode di negara demokrasi—sangat besar dalam pemilu selanjutnya.

B. Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan (Border Development)

Wilayah perbatasan merupakan pertemuan dua daerah yang berbeda otoritas administratifnya yaitu perbatasan antar daerah yang masing-masing mempunyai kewenangan mengatur daerahnya sendiri sesuai yang dimiliki berdasarkan atas kebutuhan nyata bagi masyarakat negaranya. Untuk menangani pengembangan wilayah diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar kedua daerah perbatasan.

Pengembangan wilayah secara umum merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan desentralisasi yang berorientasi pada pemecahan masalah ketertinggalan dan ketimpangan antar wilayah dalam tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang terpusat telah berdampak terhadap kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan

dan pemerintah daerah. Kawasan perbatasan antarnegara merupakan wilayah yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian



regional maupun nasional. Melalui kawasan ini, kegiatan perdagangan antarnegara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang pada gilirannya akan mendorong naiknya aktivitas produksi masyarakat, pendapatan masyarakat, dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. (Husnadi, 2006, hal. 36)

Seiring proses globalisasi saat ini, kota-kota besar maupun kawasan-kawasan strategis di Indonesia akan berkembang menjadi sebuah sistem kewilayahan dimana satu sama lain akan terikat dalam suatu sistem keseimbangan dan saling ketergantungan (*complementarity and interdependency*). Globalisasi ditandai pula oleh terjadinya revolusi teknologi informasi, transportasi, dan manajemen produksi. Revolusi tersebut telah menyebabkan batas antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi tidak jelas, munculnya polarisasi pembangunan, terbentuknya kota-kota dunia (*global cities*) dan sistem kota-kota dalam skala internasional, terbentuknya wilayah-wilayah pembangunan antar negara (*transborder region*), serta terbentuknya koridor-koridor pengembangan wilayah, baik skala regional maupun internasional. Proses globalisasi memunculkan fenomena geografis tanpa batas (*borderlessgeographies*).

Border Development atau pengembangan perbatasan adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah di dua daerah yang berbeda otoritas. Menurut terminologi Ratti (1993), pengembangan kawasan perbatasan merupakan sebuah rangkaian proses pergerakan yang semula dari daerah perbatasan (*frontier*) sebagai sebuah *barrier* (rintangan), menjadi

kawasan perbatasan sebagai *filter*, kemudian membentuk kawasan



perbatasan sebagai sebuah zona kontak. Strategi pengembangan kawasan perbatasan secara umum meliputi: (Hadi, 2008, hal. 3)

1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga.
2. Membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), keamanan (*security*), dan lingkungan (*environment*) secara serasi.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang langsung berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan.
4. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis (*tropical forest*) dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi.
6. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga

Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan secara khusus harus disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah di masing-masing kawasan perbatasan. Beberapa model pengembangan kawasan perbatasan darat yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan perbatasan yang ada

sebagai pusat pertumbuhan, transito, stasiun riset dan pariwisata alam, metropolitan. Di dalam masing-masing model tersebut dapat dibangun



beberapa komponen pembentuk kawasan perbatasan, seperti PLB, pelabuhan darat (*dry port*), kawasan wisata alam/lingkungan dan budaya, akuakultur, kawasan berikat (*bounded zone*), kawasan industri, dan *welcome plaza*. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan perlu mempertimbangkan beberapa aspek antara lain pasar di negara tetangga, potensi komoditas daerah, peluang bagi investasi swasta, serta jaminan keamanan, baik di internal maupun yang berhubungan dengan negara tetangga. Sedangkan konsep pengembangan kawasan perbatasan laut perlu lebih ditekankan pada upaya pengembangan pulau-pulau terluar yang tersebar dari mulai Selat Malaka, kepulauan Sangihe Talaud sampai di bagian selatan yaitu Pulau Wetar beserta kawasan di sekitarnya. Pulau-pulau terluar yang merupakan “halaman depan” negara di wilayah laut, harus dikembangkan segera sesuai fungsi dan potensi pulau. Masalah yang sering ditemui di sebagian besar pulau kecil terluar antara lain adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana dasar dan ekonomi, tidak terjaga oleh aparat keamanan, penduduknya lebih banyak berorientasi ke negara tetangga karena letak pulau yang lebih dekat ke negara tetangga, sangat minimnya akses informasi terhadap negara sendiri, dan sebagainya.

Untuk menjelaskan beberapa kasus pengembangan kawasan perbatasan, Wu dalam jurnalnya melontarkan tipologi pendekatan bagi pengembangan kawasan perbatasan (Wu, 2001, hal. 33). Pendekatan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *pertama*, perencanaan dengan mendahulukan membangun infrastruktur (*infrastructure led*) sebagai investasi sebelum aktifitas ekonomi

Kedua, mendahulukan investasi sektor swasta (*investment led*), dan mendahulukan program-program dan kebijakan (*policy led*) yang



bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan. Terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam kategori ini, yang menunjukkan karakteristik dominan yang ada. Sehingga pendekatan ini hanya dibatasi dengan 3 (tiga) pendekatan. (Husnadi, 2006, hal. 69)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang ketiga yakni mendahulukan program-program dan kebijakan (*policy led*) yang bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan. Dalam kaitannya dengan hal ini, kasus Uni Eropa merupakan pengembangan dengan basis pada kebijakan moneter dan kebijakan tanpa batas di Eropa (*borderless*). Dua kebijakan tersebut didukung oleh program yang spesifik dan bantuan finansial, beberapa zona eksisting industri besar yang berkembang seperti *the Upper Rhine*, *Baden Wuttenberg*, dan *Emilia-Romagna* dibangun dikawasan perbatasan dalam rangka pengembangan yang terpadu.

